

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Saat ini Teknologi memegang peranan penting, hampir semua aspek memerlukan teknologi untuk mendukung kelangsungan perusahaan. Saat ini sistem pemerintahan juga menerapkan teknologi untuk menciptakan *Good Governance* dengan menyelenggarakan *e-government*, dimana yang merupakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencapai pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terukur. Untuk mewujudkan *good governance* pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem merupakan salah satu instansi pemerintah yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika serta persandian dan statistik di pemerintah daerah Kabupaten Karangasem. Sebagai instansi pemerintah yang menangani langsung masalah Teknologi Informasi dan berperan penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Pemerintah telah menyelenggarakan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setiap tahunnya yang diikuti oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang dilaksanakan oleh Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenpanRB), yang bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan pemerintah daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, menunjukkan hasil evaluasi SPBE pada pemerintah daerah di Provinsi Bali yaitu ; (1) Pemerintah Kabupaten Buleleng memperoleh nilai indeks 3,45 dengan predikat Baik; (2) Pemerintah Kabupaten Jembrana memperoleh nilai indeks 3,14 dengan predikat Baik; (3) Pemerintah Kabupaten Karangasem memperoleh nilai indeks 2,30 dengan predikat Cukup; (4) Pemerintah Kabupaten Bangli memperoleh nilai 2,48 dengan predikat Cukup; (5) Pemerintah Kabupaten Badung memperoleh nilai 3,66 dengan predikat Sangat Baik; (6) Pemerintah Kabupaten Tabanan memperoleh nilai 3,77 dengan predikat Sangat Baik; dan (7) Pemerintah Kota Denpasar memperoleh nilai 3,80 dengan predikat Baik (MenpanRB, 2024)

Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, nilai terendah di Provinsi Bali yaitu Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan nilai indeks 2,30 dengan predikat cukup. Berikut nilai indeks dari masing-masing aspek yaitu ; Aspek 1 tentang Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE memperoleh nilai indeks 2; Aspek 2 tentang Perencanaan Strategis SPBE memperoleh nilai indeks 2; Aspek 3 tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi memperoleh nilai indeks 2,5; Aspek 4 tentang Penyelenggara SPBE memperoleh nilai indeks 3; Aspek 5 tentang

Penerapan Manajemen SPBE memperoleh nilai indeks 1,75; Aspek 6 tentang Audit TIK memperoleh nilai indeks 1; Aspek 7 tentang Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik memperoleh nilai indeks 2; dan Aspek 8 tentang Layanan Publik Berbasis Elektronik memperoleh nilai indeks 3,5. Dari rincian hasil evaluasi diatas nilai Indeks terendah diperoleh oleh aspek 6 tentang Audit TIK.

Untuk memahami kondisi TI di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem dilakukan wawancara dengan staf jabatan fungsional pranata ahli komputer dan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil wawancara kendala yang sedang dialami yaitu terkait Sumber Daya Manusia yang terbatas, pemahaman tentang SPBE masih sangat minim, kurangnya koordinasi dengan dinas lain, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengumpulan data. Ada beberapa nilai indeks SPBE yang masih stagnan yaitu nilai audit TIK dan manajemen risiko hal ini disebabkan belum adanya kebijakan yang kuat terkait manajemen risiko, kekurangan Sumber Daya Manusia ahli dan anggaran pemerintah yang belum stabil. Nilai indeks arsitektur dan peta rencana SPBE 2023 mengalami penurunan dikarenakan belum adanya kebijakan tentang SPBE, Peraturan Bupati terkait SPBE baru disahkan Desember 2023 dalam Peraturan Bupati Karangasem Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Lingkungan Pemerintah Daerah, namun belum memiliki arsitektur dan peta rencana khusus. Kurangnya tenaga ahli mengakibatkan masalah yang terjadi yaitu sempat mengalami *script injection* dimana website disisipkan script judi online. Secara internal kami belum

melakukan evaluasi terkait tata kelola TI, tetapi secara eksternal dievaluasi melalui SPBE.

Dapat disimpulkan kondisi Tata Kelola TI di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karangasem saat ini bermasalah pada kurangnya sumber daya ahli dan sumber daya anggaran yang belum stabil. Untuk menjaga stabilitas perkembangan TI, diskominfo mengupayakan optimalisasi sumber daya yang ada, seperti beberapa tenaga ahli yang merangkap tugas. Namun tenaga ahli yang dimiliki jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan tugas yang ada, sehingga proses tidak berjalan optimal. Kondisi seperti ini dapat dilakukan evaluasi. Evaluasi merupakan proses sistematis untuk menentukan kualitas objek melalui pengumpulan dan analisis data yang relevan (Kurnia, 2022). Dalam penelitian ini evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi, efektivitas dan optimalisasi yang sudah dilakukan. Evaluasi tata kelola TI bukan hanya mengevaluasi kinerja teknologi, namun juga memastikan bahwa hal-hal yang mendukung TI mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi dan mendukung tujuan bisnis.

Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) merupakan struktur yang menghubungkan masing-masing proses Teknologi Informasi, sebagai sumber energi TI, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuannya (Ikhsan dkk., 2022). Tata Kelola merupakan sistem atau proses yang mengatur hubungan antara pihak manajemen atau pengelola dengan seluruh stakeholder pada organisasi (Kusbandono dkk., 2019) yang berfokus pada penentuan wewenang dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan, pemantauan, penilaian dan

pelaksanaan untuk menyelaraskan pemanfaatan TI dengan tujuan dan strategi organisasi.

Diskominfo Karangasem memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur TI, dan perencanaan pengembangan TI, meningkatkan sumber daya TI, dan memberikan informasi dan pelayanan yang berorientasi. Untuk mengetahui sejauh mana tujuan organisasi sudah dijalankan dapat dilakukan Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan kerangka kerja yang *best practice*, yang merupakan praktik terbaik dengan kumpulan teknik, metode dan aktivitas yang lebih efektif dan efisien untuk menyelesaikan tugas dan berfokus pada keberlanjutan (Khan, t.t.). Salah satu *framework* dengan *best practice* nya adalah COBIT. Berdasarkan referensi, COBIT merupakan salah satu framework yang banyak digunakan dalam Evaluasi Tata Kelola TI. *Control Objectives for Information and Related Technology* (COBIT) merupakan panduan dokumen yang membantu manajemen, auditor dan pengguna dalam memandu tata kelola TI yang diakui secara internasional dan menyediakan *best practice* yang terstruktur untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan pengelolaan TI yang efektif dan efisien. (Purnasari & Nurhayati, 2023). COBIT telah mengalami beberapa kali perkembangan, yang dimulai dari COBIT versi 1 (1996) hingga versi terbaru yaitu COBIT 2019. Pada penelitian ini menggunakan COBIT 2019 sebagai kerangka kerja dalam melakukan evaluasi tata kelola TI pada Diskominfo Kabupaten Karangasem. Adapun alasan penggunaan framework COBIT 2019 pada penelitian ini adalah COBIT 2019 berfokus pada pengembangan yang berkelanjutan, memfasilitasi implementasi

yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan, dan menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan digital.

COBIT 2019 memiliki 5 fokus area dan terdapat 40 proses didalamnya, sehingga lebih praktis dan dapat disesuaikan dengan organisasi melalui pemilihan proses (*objective*) dan diselaraskan dengan strategi dan tujuan organisasi. Dalam COBIT 2019 sudah menyediakan panduan desain sistem tata kelola teknologi Informasi untuk menentukan proses yang dilakukan oleh organisasi (Insani, 2021). Ada lima domain dalam COBIT 2019 yaitu *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM) yang memiliki 5 proses yaitu EDM01 sampai dengan EDM05, *Align, Plan, and Organize* (APO) memiliki 14 proses yaitu APO01 sampai dengan APO14, *Build, Acquire and Implement* (BAI) memiliki 11 proses yaitu BAI01 sampai dengan BAI11, *Deliver, Service and Support* (DSS) memiliki 6 proses yaitu BAI01 sampai dengan BAI06, dan *Monitor, Evaluate and Assess* (MEA) memiliki 4 proses yaitu MEA01 sampai dengan MEA04.

COBIT 2019 dapat membantu organisasi dalam merencanakan, membangun, mengelola dan mengawasi penggunaan Teknologi Informasi (TI). Dalam konteks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik), COBIT 2019 dapat membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan TI dengan proses bisnis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip pada COBIT 2019, perusahaan dapat memastikan bahwa penggunaan TI mendukung tujuan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi COBIT 2019 adalah alat dalam mengelola teknologi informasi dan mengoptimalkan nilai yang dihasilkan dari penggunaan TI.

Setelah permasalahan ditemukan, peneliti melakukan pemetaan terhadap permasalahan dengan domain pada COBIT 2019. Dari hasil tersebut diperoleh permasalahan yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia ahli dan minimnya pemahaman tentang SPBE, Belum adanya kebijakan yang kuat terkait Manajemen Risiko, sempat mengalami *script injection*, Keterbatasan anggaran dan biaya, dan Keterlambatan dalam mengesahkan kebijakan arsitektur dan peta rencana SPBE dan belum ada arsitektur dan peta rencana SPBE khusus. Dari permasalahan diatas diperoleh domain yang relevan adalah domain EDM01 *Ensured governance framework setting and maintenance*, EDM03 *Ensured risk optimization*, APO06 *Managed Budget and Costs*, APO07 *Managed Human Resources* dan DSS05 *Managed Security Services*.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah diperoleh sebagai berikut

1. Bagaimana hasil evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem?
2. Bagaimana rekomendasi perbaikan yang disarankan dari hasil evaluasi Tata Kelola TI pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi (TI) pada Diskominfo Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut;

1. Mengetahui tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem yang diukur menggunakan framework COBIT 2019.
2. Memberikan rekomendasi perbaikan terkait Tata Kelola TI guna meningkatkan pelayanan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem berdasarkan framework COBIT 2019.

#### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk memberikan batasan pada penelitian dan lebih fokus pada objek penelitian, adapun beberapa ruang lingkup penelitian yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Penelitian evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem menggunakan Framework COBIT 2019
2. Evaluasi yang dilakukan berfokus pada Domain EDM01 Memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola., EDM03 Memastikan optimalisasi risiko, APO06 Mengelola anggaran dan biaya, APO07 Sumber daya manusia yang dikelola, dan DSS05 Layanan keamanan terkelola.
3. Penelitian ini menggunakan COBIT 2019 sebagai kerangka kerja penelitian, dan standar ISO/IEC 15504 sebagai standar dalam pengukuran tingkat kapabilitas
4. Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan yang disusun berdasarkan hasil evaluasi dan instrumen dari COBIT 2019.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Bagi Organisasi

Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi perbaikan, dimana dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana kerja kedepannya untuk meningkatkan kualitas dalam mengelola Teknologi Informasi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya TI, meningkatkan kepatuhan terhadap standar peraturan yang berlaku, meningkatkan transparansi pengelolaan TI, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi.

#### 2. Bagi Peneliti

Manfaat yang diperoleh oleh peneliti yaitu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang TI, khususnya mengenai proses TI dan praktik yang baik dalam mengelola sumber daya TI secara efektif dan efisien, mendapatkan pengalaman dan relasi untuk pengembangan diri dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini dan meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dunia nyata menggunakan metode yang sesuai.